



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda No. 134 Semarang 50132

Kakanwil 516456, Kormin 516457, Kantor : 515301-545671-515302
Fax : 520071 telex : 2262 PK WIL SM

Nomor : 1137a/103.a/U/97

Lampiran : 1 exp

Hal : Keputusan Mendikbud RI
tentang pembukaan dan penegerian
sekolah tahun pelajaran 1995/1996

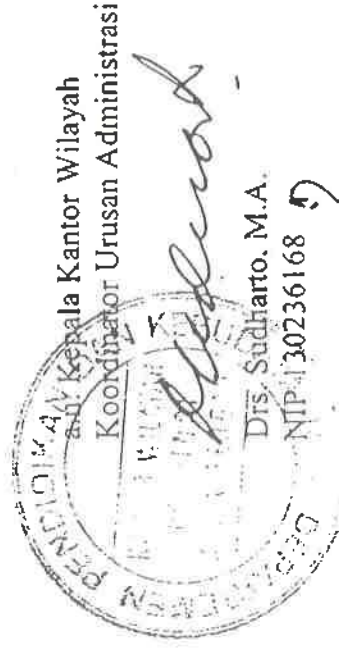
23 Juni 1997

**Yth. Kakan/Kakanin Depdikbud
Kabupaten/Kotamadya
se Jawa Tengah**

Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI no. 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 telah ditetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996. Pembukaan dan penegerian sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah untuk tahun pelajaran 1995/1996 sebanyak : 2 TK, 1 SLB, 66 SLTP, 11 SMU dan 3 SMK (fotokopi SK terlampir).

Sehubungan dengan hal itu harap Keputusan Mendikbud tersebut segera diinformasikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan dan untuk keperluan legalisasi fotokopi SK Mendikbud dimaksud cukup dilakukan di Kantor/Kantor Inspeksi Depdikbud masing-masing.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Kabag : Ren, Kap, Keu, dan Kepeg Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabis : Dikdas, Dikmenum, dan Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Kepala Sekolah ybs



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

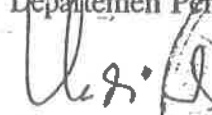

Mardiyah
NIP 130344753



Foto cepy sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi

Dr. Sudarto, MA.
NIP. 130276168.

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Blora	—	Kota Blora	Kabupaten Blora	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150
		2. TK Negeri Magelang	—	Mertoyudan	Kabupaten Magelang	11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230 11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350
		3. SLB Negeri Surakarta	SLB Pelatihan SGPLB Surakarta	Surakarta	Kotamadia Surakarta	11.1.4.4298.23.01.03.5110 11.1.4.4298.23.01.03.5120 11.1.4.4298.23.01.03.5150 11.1.4.4298.23.01.03.5210 11.1.4.4298.23.01.03.5220 11.1.4.4298.23.01.03.5230 11.1.4.4298.23.01.03.5250 11.1.4.4298.23.01.03.5350
		4. SLTP Negeri 15 Pekalongan	—	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150
		5. SLTP Negeri 16 Pekalongan	—	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230
		6. SLTP Negeri 17 Pekalongan	—	Pekalongan Selatan	Kotamadia Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		7. SLTP Negeri 18 Tegal	—	Tegal	Kotamadia Tegal	
		8. SLTP Negeri 19 Tegal	—	Tegal Selatan	Kotamadia Tegal	
		9. SLTP Negeri 9 Cilacap	—	Cilacap Tengah	Kota Administratif Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SLTP Negeri 4 Banyumas		Banyumas	Kabupaten Banyumas	
		11. SLTP Negeri 2 Kembaran		Kembaran	Kabupaten Banyumas	
		12. SLTP Negeri 3 Sokaraja		Sokaraja	Kabupaten Banyumas	
		13. SLTP Negeri 2 Madukara		Madukara	Kabupaten Banjarnegara	
		14. SLTP Negeri 2 Pagentan		Pagentan	Kabupaten Banjarnegara	
		15. SLTP Negeri 2 Bawang		Bawang	Kabupaten Batang	
		16. SLTP Negeri 4 Limpung		Limpung	Kabupaten Batang	
		17. SLTP Negeri 3 Tulis		Tulis	Kabupaten Batang	
		18. SLTP Negeri 2 Sambong		Sambong	Kabupaten Blora	
		19. SLTP Negeri 2 Banjarejo		Banjarejo	Kabupaten Blora	
		20. SLTP Negeri 3 Randublatung		Randublatung	Kabupaten Blora	
		21. SLTP Negeri 2 Selo		Selo	Kabupaten Boyolali	

1	2	3	4	5	6	7
		22. SLTP Negeri 2 Sambi	—	Sambi	Kabupaten Boyolali	
		23. SLTP Negeri 2 Karanggede	—	Karanggede	Kabupaten Boyolali	
		24. SLTP Negeri 2 Paguyangan	—	Paguyangan	Kabupaten Brebes	
		25. SLTP Negeri 2 Sirampag	—	Sirampag	Kabupaten Brebes	
		26. SLTP Negeri 2 Karangpucung	—	Karangpucung	Kabupaten Cilacap	
		27. SLTP Negeri 2 Gandrungmangu	—	Gandrungmangu	Kabupaten Cilacap	
		28. SLTP Negeri 3 Kawunganten	—	Kawunganten	Kabupaten Cilacap	
		29. SLTP Negeri 1 Sampang	—	Sampang	Kabupaten Cilacap	
		30. SLTP Negeri 3 Bonang	—	Bonang	Kabupaten Demak	
		31. SLTP Negeri 2 Wedung	—	Wedung	Kabupaten Demak	
		32. SLTP Negeri 3 Geyer	—	Geyer	Kabupaten Grobogan	
		33. SLTP Negeri 3 Gabus	—	Gabus	Kabupaten Grobogan	
		34. SLTP Negeri 2 Jenawi	—	Jenawi	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 5 Tawangmangu	—	Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar	
		36. SLTP Negeri 2 Pejagoan	—	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
		37. SLTP Negeri 2 Pageruyung	—	Pageruyung	Kabupaten Kendal	
		38. SLTP Negeri 2 Limbangan	—	Limbangan	Kabupaten Kendal	
		39. SLTP Negeri 3 Weleri	—	Weleri	Kabupaten Kendal	
		40. SLTP Negeri 2 Salaman	—	Salaman	Kabupaten Magelang	
		41. SLTP Negeri 2 Ngablak	—	Ngablak	Kabupaten Magelang	
		42. SLTP Negeri 3 Secang	—	Secang	Kabupaten Magelang	
		43. SLTP Negeri 2 Margoyoso	—	Margoyoso	Kabupaten Pati	
		44. SLTP Negeri 2 Karanganyar	—	Karanganyar	Kabupaten Pekalongan	
		45. SLTP Negeri 4 Wiradesa	—	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan	
		46. SLTP Negeri 4 Kajen	—	Kajen	Kabupaten Pekalongan	

1	2	3
		47. SLTP Negeri 2 Belik
		48. SLTP Negeri 2 Pulosari
		49. SLTP Negeri 2 Karangmoncol
		50. SLTP Negeri 2 Bayan
		51. SLTP Negeri 3 Grabag
		52. SLTP Negeri 2 Bagelen
		53. SLTP Negeri 2 Padamara
		54. SLTP Negeri 2 Kaliori
		55. SLTP Negeri 2 Banyubiru
		56. SLTP Negeri 5 Ungaran
		57. SLTP Negeri 2 Sumowono
		58. SLTP Negeri 2 Miri
		59. SLTP Negeri 3 Tawangsari

4	5	6	7
	Belik	Kabupaten Pematang	
	Pulosari	Kabupaten Pematang	
	Karangmoncol	Kabupaten Purbalingga	
	Bayan	Kabupaten Purworejo	
	Grabag	Kabupaten Purworejo	
	Bagelen	Kabupaten Purworejo	
	Padamara	Kabupaten Purbalingga	
	Kaliori	Kabupaten Rembang	
	Banyubiru	Kabupaten Semarang	
	Ungaran	Kabupaten Semarang	
	Sumowono	Kabupaten Semarang	
	Miri	Kabupaten Sragen	
	Tawangsari	Kabupaten Sukoharjo	

1	2	3	4	5	6	7
		60. SLTP Negeri 3 Weru		Weru	Kabupaten Sukoharjo	
		61. SLTP Negeri 2 Bojong		Bojong	Kabupaten Tegal	
		62. SLTP Negeri 2 Bumijawa		Bumijawa	Kabupaten Tegal	
		63. SLTP Negeri 2 Tretep		Tretep	Kabupaten Temanggung	
		64. SLTP Negeri 2 Kandangan		Kandangan	Kabupaten Temanggung	
		65. SLTP Negeri 3 Wadaslintang		Wadaslintang	Kabupaten Wonosobo	
		66. SLTP Negeri 2 Sapuran		Sapuran	Kabupaten Wonosobo	
		67. SLTP Negeri 2 Nguntoronadi		Nguntoronadi	Kabupaten Wonogiri	
		68. SLTP Negeri 3 Purwantoro		Purwantoro	Kabupaten Wonogiri	
		69. SLTP Negeri 2 Giriwoyo		Giriwoyo	Kabupaten Wonogiri	
		70. SMU Negeri 1 Purwonegoro		Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150
		71. SMU Negeri 1 Cepogo		Cepogo	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230
		72. SMU Negeri 1 Paguyangan		Paguyangan	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350

1	2	3	4	5	6	7
		73. SMU Negeri 1 Sayung	—	Sayung	Kabupaten Demak	
		74. SMU Negeri 1 Karangrayung	—	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		75. SMU Negeri 1 Rowokele	—	Rowokele	Kabupaten Kebumen	
		76. SMU Negeri 2 Kendal	—	Kendal	Kabupaten Kendal	
		77. SMU Negeri 1 Belik	—	Belik	Kabupaten Pemasang	
		78. SMU Negeri 1 Kejobong	—	Kejobong	Kabupaten Purbalingga	
		79. SMU Negeri 1 Suruh	—	Suruh	Kabupaten Semarang	
		80. SMK Negeri 2 Karanganyar	—	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	11.1.2.4267.23.01.03.5110 11.1.2.4267.23.01.03.5120 11.1.2.4267.23.01.03.5150
		81. SMK Negeri 1 Gombong	—	Gombong	Kabupaten Kebumen	11.1.2.4267.23.01.03.5210 11.1.2.4267.23.01.03.5220 11.1.2.4267.23.01.03.5230
		82. SMK Negeri 2 Adiwerna	—	Adiwerna	Kabupaten Tegal	11.1.2.4267.23.01.03.5250 11.1.2.4267.23.01.03.5350

1	2	3	4	5	6	7
8.	PENEGERIAN	1. SMU Negeri 3 Brebes	SMA Puspongoro I Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150 11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230 11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4235.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

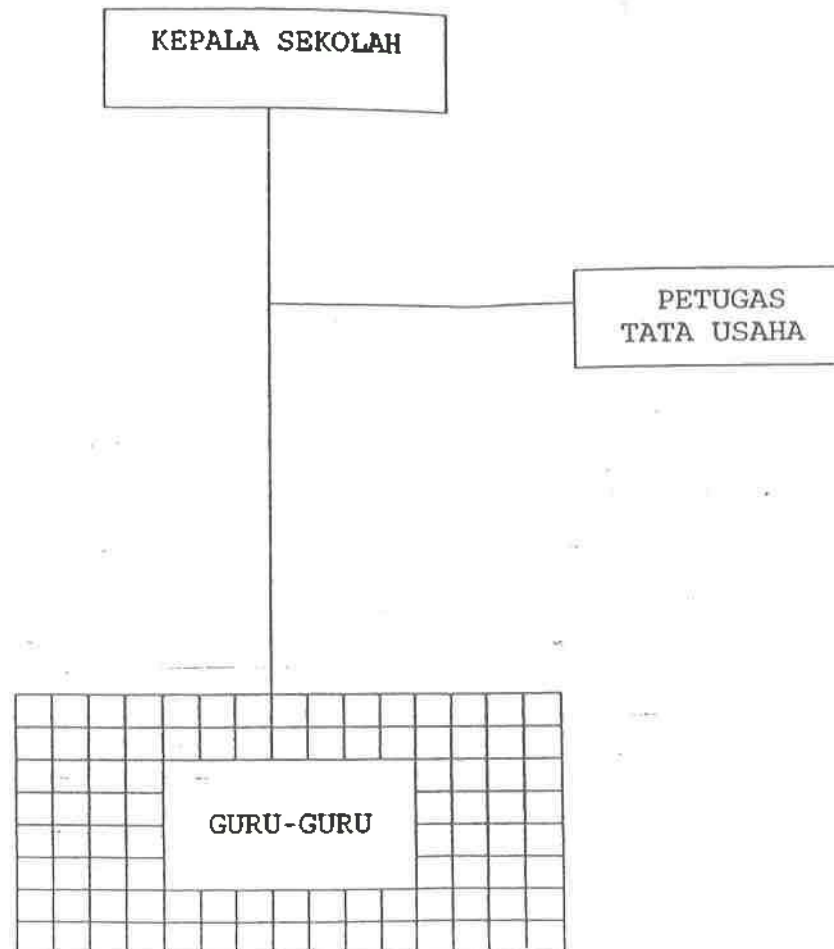
td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

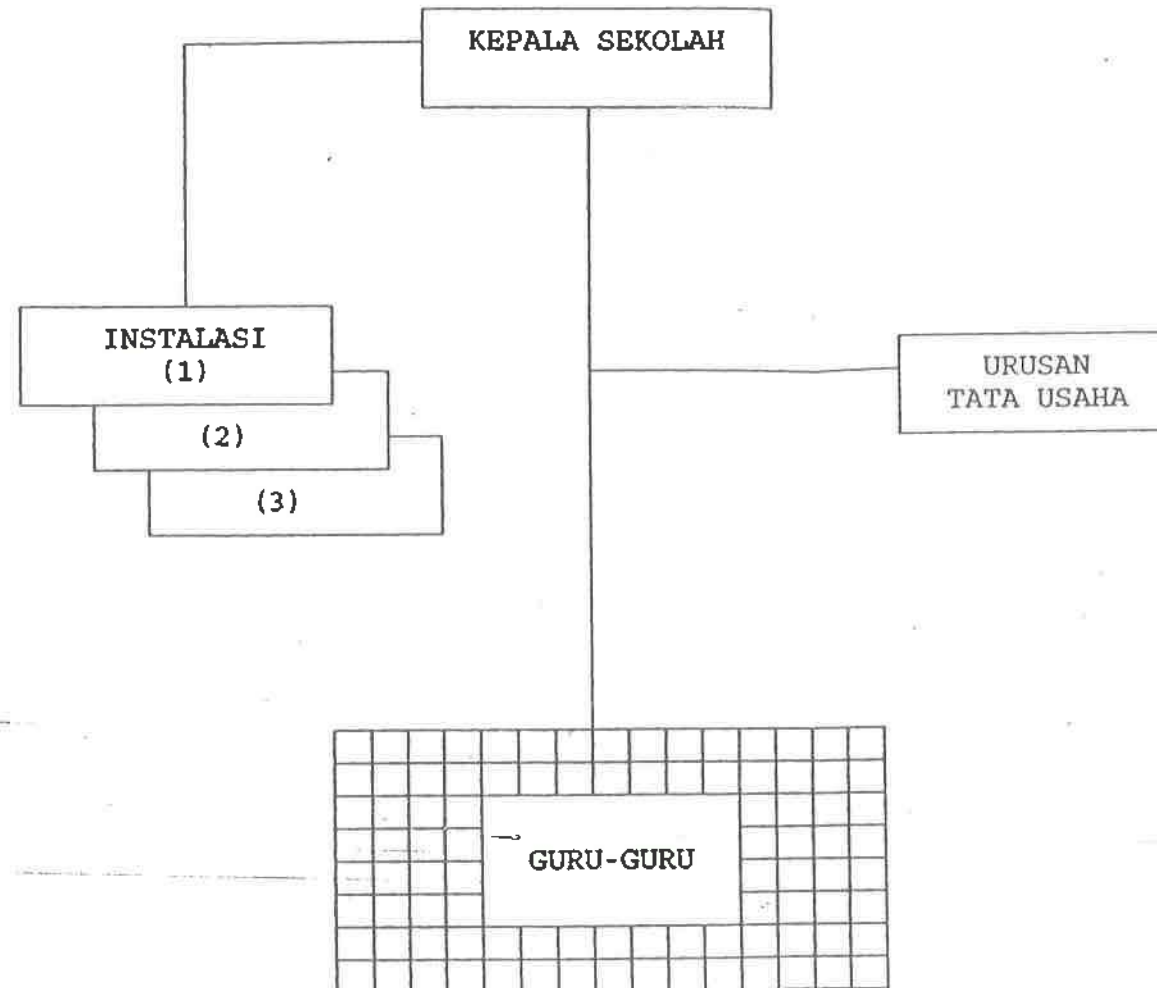
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/0/1997 TANGGAL 16 Mei 1997.

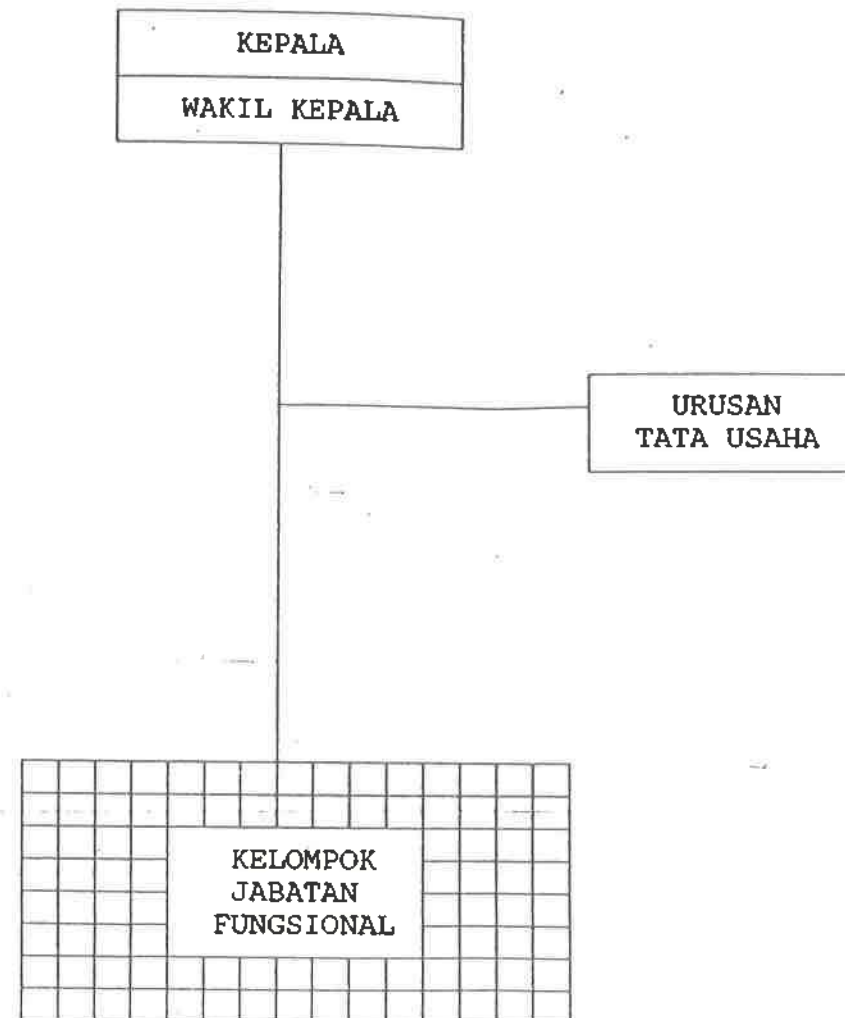
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



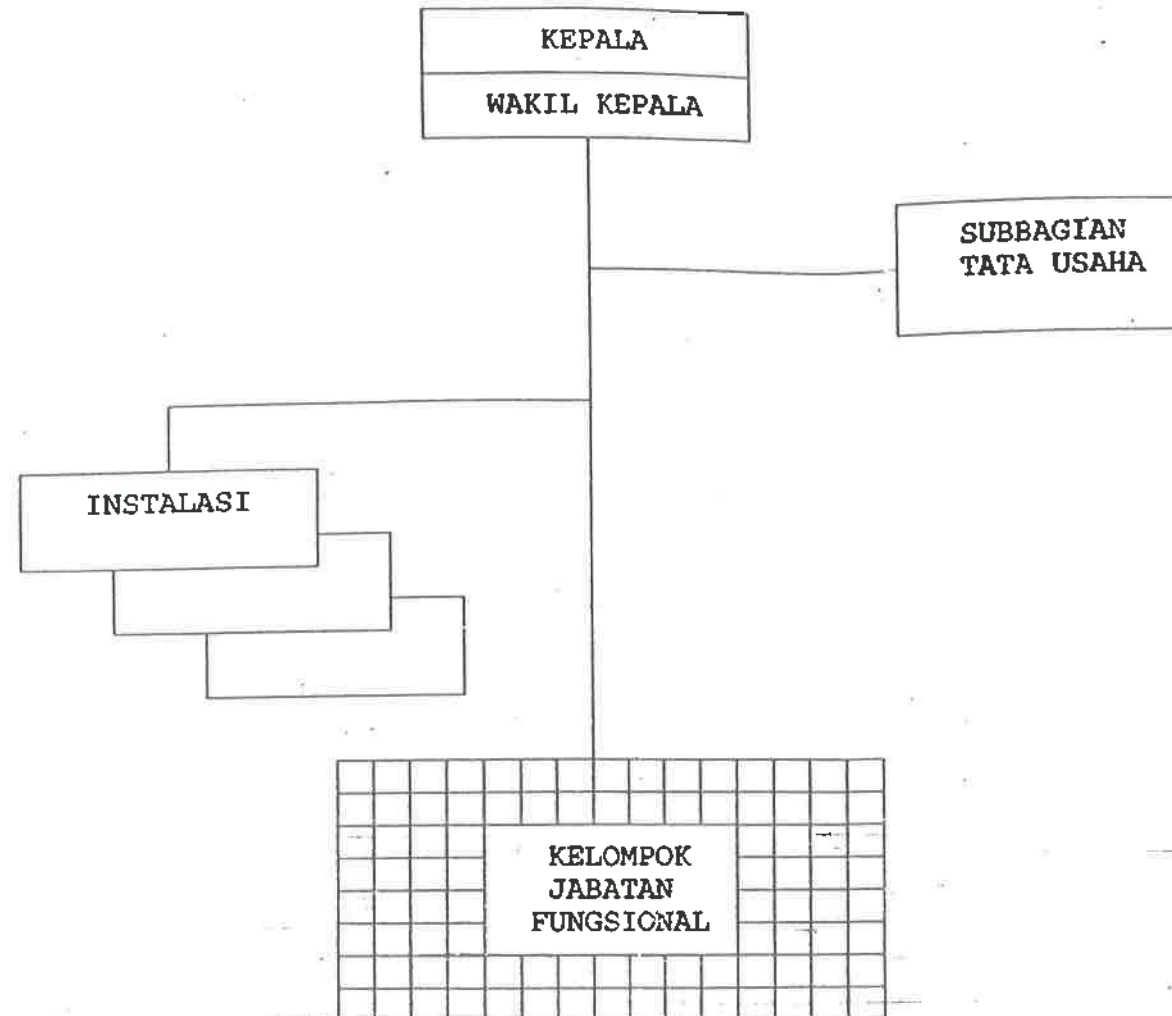
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



**D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM**



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro